RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017, Permendagri No.90 tahun 2020, Kepmendagri No. 050.5889 tahun 2021.

Penyusunan Recana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RPJMD 2019-2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilaksanakan melalui pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Lingkungan Hidup.

Borong, 06 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai Timur,

Kasmir Dalis Ariyanto, S. Hut
Pembina Tk.I
Nip. 19740809 200604 1 007

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	1
BAB I. PENDAHULUAN	.....	2
1.1 Latar Belakang	.....	2
1.2 Landasan Hukum	.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja	.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.	.....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	.....	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	29
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	.....	44
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	44
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah	.....	46
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	.....	62
BAB V. PENUTUP	.....	67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas: Merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi Bidang Lingkungan Hidup sesuai ruang lingkup kewenangan.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup;
b. peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
c. peningkatan PAD Sektoral;
d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
e. pengoordinasian dan pengawasan di bidang Lingkungan Hidup;
f. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan dukungan dana yang memadai untuk memanfaatkan, mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahu 2022 ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) T.A 2022, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur periode 2019-2024 dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

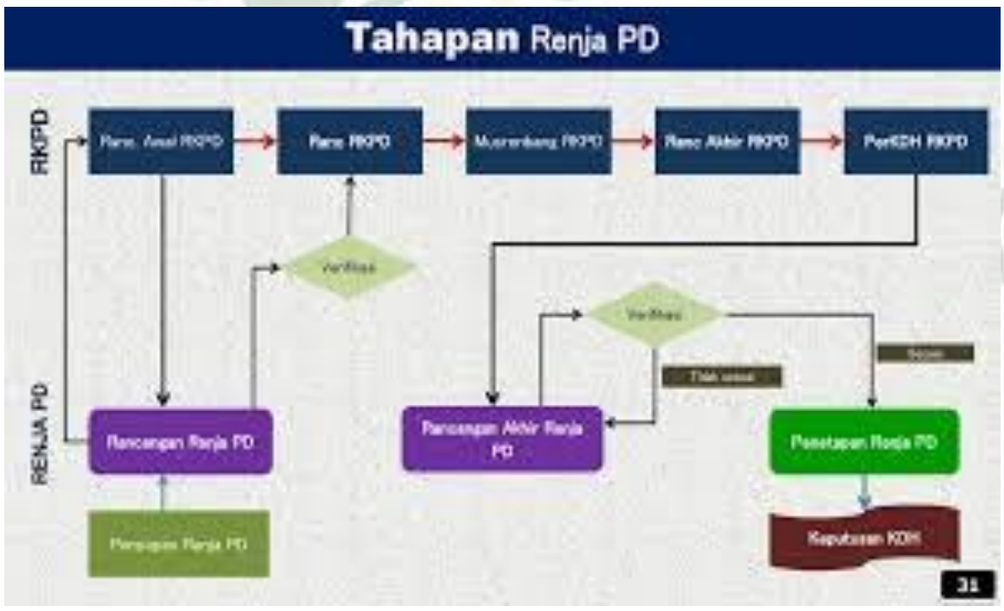
Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja OPD. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja OPD
2. Penyusunan Rancangan Renja OPD
3. Pelaksanaan Forum OPD
4. Penetapan Renja OPD.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja OPD dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing OPD.

Gambar. G.1.



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 – 2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 - 2024;
10. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 adalah:

1) Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur.
2) Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3) Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2019- 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Sistematika penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, keterkaitan antara Renja Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur.

2.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun-tahun sebelumnya.

2.5 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan indikator kinerja yang sudah telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur.

2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

3.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, melalui proses musrenbangdes, musrenbangcam sampai dengan musrenbangkab yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

3.4 Tujuan dan sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

3.5 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

SIHU LANGSUNG, HIJAU BUMIKU

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN LALU

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024.

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan sebanyak 5 (lima) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp **3.607.984.545.** Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp **3.506.801.671** atau sebesar **97,20%**. Pendanaan tersebut digunakan untuk Membiayai Belanja Operasi sebesar Rp 2.951.692.345 sedangkan realisasi belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.850.559.671 Atau Sebesar 96,59%. Pendanaan Untuk Membiayai Belanja Modal sebesar **Rp** 659.292.200**,** dan realisasi belanja Belanja Modal sebesar **Rp** 656.242.000, atau sebesar 99,99**%.** Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp 80.000.000**, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp **63.085.500** atau sebesar **78,86%.** Pelaksanaan program-program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel II.1

Jenis Belanja

No	Uraian Belanja	Total Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	a) Belanja Pegawai	1.536.655.065	1.478.449.891	96,21
	b) Belanja Barang dan Jasa	1.415.037.280	1.372.109.780	96,97
	c) Belanja Modal	656.292.200	656.242.200	99,99
	T o t a l	**3.607.984.545**	**3.509.851.871**	**97,20**

Tabel II.2

Jumlah Belanja Program dan Kegiatan yang menjawab Sasaran dan Indikator

No	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN %
1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah"**	**900.000.000**	**895.877.500**	**99,54**
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota**	**900.000.000**	**Rp 895.877.500**	**99,54**
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang yang Disusun	400.000.000	Rp396.309.500	99,08
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	500.000.000	Rp499.568.000	**99,91**
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**5.000.000**	**Rp4.960.000**	99,20
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**5.000.000**	**Rp4.960.000**	99,20
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)		5.000.000	Rp4.960.000	99,20
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang Dikelola**	**5.000.000**	**Rp4.915.000**	98,30
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang di Kelola**	**5.000.000**	**Rp4.915.000**	98,30
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Luas Areal RTH yang dikelola	5.000.000	Rp4.915.000	98,30
4	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)**	**4.000.000**	**Rp3.810.000**	**95,25**
	Penyimpanan sementara Limbah B3	**Persentase kegiatan penyimpanan sementara limbah B3**	**2.000.000**	**Rp1.815.000**	90,75
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang	2.000.000	Rp1.815.000	90,75

	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)**	**2.000.000**	**Rp1.995.000**	99,75
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2.000.000	Rp1.995.000	99,75
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**10.000.000**	**9.970.000**	**99,70**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**10.000.000**	**9.970.000**	99,70
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)		5.000.000	4.975.000	99,50
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)		5.000.000	4.995.000	99,90
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		**3.000.000**	**Rp2.970.000**	99,00
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		**3.000.000**	**Rp2.970.000**	99,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)		3.000.000	Rp2.970.000	99,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**5.000.000**	**5.000.000**	100,00
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)		5.000.000	5.000.000	100,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		**2.000.000**	**Rp1.835.000**	**91,75**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan		**2.000.000**	Rp1.835.000	91,75

	Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)		2.000.000	Rp1.835.000	91,75
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manggarai Timur**	**815.929.480**	**Rp778.575.780**	**95,42**
	Pengelolaan Sampah	**Jumlah sampah yang di Kelola**	**815.929.480**	**Rp778.575.780**	95,42
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah Yang diolah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota"	502.137.480	Rp502.137.480	100,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	313.792.000	Rp276.438.300	88,10

Tabel II.3
Jumlah Belanja Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang

No	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN %
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 1.858.055.065**	**Rp 1.798.888.391**	**96,82**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah**	**6.070.000**	**Rp 6.070.000**	**100,00**
		Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja			
		Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra			
		Persentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah	6.070.000	6.070.000	100,00
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentasi Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.536.955.065**	**1.478.749.891**	**96,21**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1.485.055.065	Rp1.430.349.891	96,32
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.900.000	Rp48.400.000	93,26
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**54.130.000**	**54.130.000**	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000	100,00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	41.630.000	41.630.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	**100,00**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.500.000**	**3.595.500**	79,90
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000	3.595.500	79,90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**256.400.000**	**256.343.000**	**99,98**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.400.000	256.343.000	99,98

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung (belanja pegawai/gaji) sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp 1.536.655.065 dan terealisasi sebesar Rp 1.478.449.891 (96,21%).

Tabel II.4

Realisasi keuangan Program & Kegiatan Belanja Tidak Langsung Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023

No	Uraian Belanja	Total Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.536.655.065	1.478.449.891	(96,21%).

B. Belanja Langsung

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pelayanan Administrasi perkantoran sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 11 (Sebelas) kegiatan dalam program ini untuk mewujudkan ketersediaan/kesiapan administrasi, yaitu:

1) penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;
2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
3) Penyediaan jasa administrasi dan keuangan;
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

6) Penyediaan alat tulis kantor;
7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8) Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor;
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10) Penyediaan makanan dan minuman rapat;
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan lainnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kepadamasyarakat.

***Permasalahan* :**

- Jumlah penggandaan/fotocopi dokumen maupun persuratan cenderung meningkat dari tahun ke tahun

***Solusi*:**

- Penyimpanan arsip dalam bentuk digital/softcopy, dan pencetakan baru dilakukan bila benar-benar diperlukan. Penggandaan dokumen sesuai kebutuhan.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Pelaksanaan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan agar dapat sesuai dengan target yang sudah direncanakan. diharapkan secara bertahap sudah sejak awal dapat dikendalikan dan diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta solusi yang perlu dilaksanakan untuk mengatasinya.

Permasalahan:

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) masih perlu ditingkatkan pelaksanaanya.

Solusi :

- Optimalisasi pelaksanaan SPIP melalui satgas yang ada. Perlunya peningkatan kualitas SDM perencana di sub bagian Program Data evaluasi dan keuangan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Program ini berfungsi untuk mendukung pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

***Permasalahan* :**

- Diperlukan rehab interior untuk kenyamanan pelayanan
- Selain itu juga diperlukan penambahan peralatan & fasilitas perkantoran berupa wifi karena terdapat beberapa blank spot internet di dalam kantor Dinas Lingkungan Hidup, untuk proses kerja yang lebih cepat dan efisien.

- Penggunaan listrik dan air semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan

Solusi:

- Penganggaran pemeliharaan dan penggantian suku cadang
- Pengadaan Wifi
- Menghemat Pemakaian

4. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Sampah

Indikator program ini adalah Presentase Jumlah Sampah Perkotaan Yang dikelola dilaksanakan melalui kegiatan dan Jumlah Kelompok 3R:

- Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

Pemasalahan:

- Pengangakutan sampah belum menjangkau seluruh wilayah kota borong setiap hari.
- Jumlah kendaraan roda 6, roda 3, tidak mampu mengangkut sampah setiap hari di kota borong
- Terbatasnya jumlah tenaga kebersihan
- Biaya operasional sangat terbatas
- Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Solusi:

- Penambahan jumlah armada pengangkutan sampah serta sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluuh wilayah perkotaan
- Meningkatkan jumlah tenaga kebersihan
- Meningkatkan anggaran opersaional persampahan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan lingkungan dengan mengadakan sosialisasi dan pembentukan kelompo 3R.

5. Program Pelestarian Lingkungan Hidup

Merupakan salah satu program prioritas Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup Kabupaten Manggarai Timur secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup

Permasalahan:

- Data Kualitas lingkungan hidup yang disajikan belum menggambarkan seutuhnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Timur.
- Kurangnya peralatan pengukuran kualitas air, udara dan tutupan lahan.
- Pelaku usaha masih banyak yang belum memliki rekomendasi lingkungan hidup dan rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.

Solusi:

- Penyediaan peralatan laboratorium lingkungan hidup untuk mengoptimalkan laporan kualitas lingkungan hidup.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Kegiatan Konservasi sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air.

Permasalahan:

- Belum tersedianya data yang memadai terkait data Lahan Kritis, data mata air, dan data kerusakan lahan.
- Koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat belum berjalan dengan baik.

Solusi:

- Melaksanakan pendataan tentang data Lahan Kritis, data mata air, dan data kerusakan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur
- Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak agar terjadi kesinkronan dalam pelaksanaan.
- Meningkatkan soialisasi pada masyarakat / kelompok masyarakat / sekolah dalam hal perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup daripada tahun tahun yang sudah berjalan.

Kegiatan Penataan RTH

Permasalahan :

- Koordinasi antar instansi dengan masyarakat masih kurang sehingga ketidaksinkronan dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Masih diperlukan identifikasi dan rencana lokasi RTH di Perkotaan Borong untuk dapat memenuhi 20 % RTH Publik.

Solusi :

- Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak agar terjadi kesinkronan dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Pengadaan lahan RTH oleh pemerintah kabupaten di tiap kelurahan dan atau desa di wilayah perkotaan Borong.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Renstra PD s/d Tahun lalu 2023 (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023 (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja PD) TAHUN 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8=7/6*		*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*			
A	**Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Program :**	**Outcome :**													
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**9.267.499.151**	**97,28 %**	**1.798.888.391**	**100%**	**2.352,520.013**	**97,28 %**	**1.798.888.391**	**97,28**	**76,47**	**100%**	**294,56**	**73,64%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah**	**100%**	**97.957.004**	**138%**	**6.070.000**	**100%**	**24.441.695**	**138%**	**6.070.000**	**138**	**24,83**	**100%**	**376**	**94%**
			Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja	91-100		77,85 %		91-100	-	77,85 %		Sedang		91-100		
			Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra	91-100		56,58 %		91-100	-	56,58 %		Rendah		91-100		
			Persentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah	100%		100%		100%	-	100%		100		100%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah	4 Dok	33.037.875	1 Dok	6.070.000	1 Dok	5.075.000	1 Dok	6.070.000	100	1,19	1 Dok	**3**	**0,75%**
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	4 Dok	15.226.125	1 Dok		1 Dok	5.075.000	1 Dok		100	0	1 Dok	**3**	**0,75%**
			Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	8 Dok	12.180.900	2 Dok		2 Dok	4.060.000	2 Dok		100	0	2 Dok	**6**	**1,5%**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	4 Dok	3.045.225	1 Lap		1 Lap	1.015.000	1 Lap		100	0	1 Lap	**3**	**0,75%**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD Perangkat Daerah	4 Dok	3.045.225	1 Dok		1 Dok	1.015.000	1 Dok		100	0	1 Dok	**3**	**0,75%**
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	4 Dok	3.045.225	1 Dok		1 Dokumen	1.015.000	1 Dok		100	0	1 Dok	**3**	**0,75%**

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD Perangkat Daerah	4 Dok	3.045.225	1 Dok		1 Dokumen	1.015.000	1 Dok		100	0	1 Dok	**3**	**0,75%**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD	4 Lap	3.022.613	1 Dok		1 Dokumen	507.500	1 Dok		100	0	1 Dok	**3**	**75%**
			Jumlah Laporan Lakip	4 Lap	1.522.613	1 Lap		1 Laporan	507.500	1 Lap		100	0	1 Lap	**3**	**0,75%**
			Jumlah Laporan LKPJ	4 Lap	1.522.613	1 Lap		1 Laporan	507.500	1 Lap		100	0	1 Lap	**3**	**0,75%**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Renja	4 Dok	16.218.142	4 Lap		1 Laporan	3.634.195	1 Lap		100	0	1 Lap	**6**	**1,5%**
			Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Renstra	3 Dok	3,045,225	1 Dok		1 Dokumen	1,015,000	4 Dok		400	0	1 Dok	**6**	**1,5%**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentasi Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7.876.855.184**	**100%**	**1.478.749.891**	**100%**	**1.983.357.123**	**100%**	**1.478.749.891**	**100**	**0,74**	**100%**	**300**	**75%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang	7.527.881.716	19 Org	1.430.349.891	23 Org	1.895.770.012	19 Org	1.430.349.891	0,82	0,75	23 Org	**61**	**15,25**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Orang	340.578.496	6 Org	48.400.000	6 Org	85.455.611	6 Org	48.400.000	100	0,56	6 Org	**18**	**4,5**
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dok	1.522.613	-		1 Dok	507.500	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	3 Lap	1.522.613	-		1 Lap	507.500	-		0	0	1 Lap	**1**	**0,25**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Lap	1.218.090	1 Lap		1 Lap	406.000	1 Lap		100	0	1 Lap	**3**	**0,75**
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Laporan	1.218.090	-		1 Lap	406.000	-		0	0	1 Lap	**1**	**0,25**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	2.913.568	4 Lap		1 Lap	304.500	4 Lap		400	0	1 Lap	**9**	**2,25**
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**27.540.350**	**100 %**		**100%**	**6.090.000**	**100 %**		**100**	**0**	**100%**	**300**	**75**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD	4 DOK	1.522.613	-		1 Dok	507.500	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Progres Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	1.522.613	-		100%	507.500	-		0	0	100%	**100**	**25**
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok	1.522.613	-		1 Dok	507.500	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi BMD, Laporan Mutasi BMD, Laporan Pengadaan BMD, LBPS dan LBPT	3 Dok	1.522.613	1 Dok		1 Dok	507.500	1 Dok		100	0	1 Dok	**3**	**0,75**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	3 Lap	7.917.585	1 Dok		1 Dok	2.639.000	1 Dok		100	0	1 Dok	**3**	**0,75**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Sewa, Pinjam Pakai pada SKPD dan Dokumen Pemanfaatan BMD Lainnya	4 Dok	12.314.225	-		1 Dok	1.015.000	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Sewa, Pinjam Pakai pada SKPD dan Dokumen Pemanfaatan BMD Lainnya	3 Dok	1.218.090	-		1 Dok	406.000	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektoral**	**Rp. 1 Milyar**	**10.658.288**	**78.757.500**		**250.000.000**	**3.552.500**	**78.757.500**		**0,31**	**0**	**250.000.000**	**407.515.000**	**101.878.750**
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 DOK	1.522.613	-		1 Dok	507.500	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**

		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	4 DOK	6.090.450	1 Dok		1 Dok	2.030.000	1 Dok		100	0	1 Dok	**3**	**0,75**
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dok	3.045.225	-		1 Dok	1.015.000	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**26.195.000**	**0**		**100%**	**13.000.000**	**0**		**0**	**0**	**100%**	**100**	**25**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Buah	**20.150.000**	-		25 Buah	10.000.000	-		0	0	25 buah	**25**	**6,25**
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	**2.015.000**	-		1	1.000.000	-		0		1 Dok	**1**	**0,25**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Kali	**2.015.000**	-		2 Kali	1.000.000	-		0	0	2 Kali	**2**	**0,50**
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dok	**2.015.000**	-		1 Dok	1.000.000	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**489.946.740**	**100%**	**54.130.000**	**100%**	**118.350.541**	**100%**	**54.130.000**	**100**	0,45	**100%**	**300**	**75**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Buah	2.098.743	5 Bh	500.000	5 Buah	532.875	5 Buah	500.000	100	0,93	5 Buah	**15**	**3,75**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Buah	1.522.613	-		5 Buah	507,500	-		0	0	5 Buah	**5**	**1,25**
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 Buah	1.522.613	-		5 Buah	507,500	-		0	0	5 Buah	**5**	**1,25**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	124 Buah	101.252.200	31 Bh	41.630.000	18 Buah	19.480.000	31 Buah	41.630.000	1,72	2,13	19 Buah	**81**	**20,25**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	300 Buku	101.252.200	75 Bk	2.000.000	75 Buku	2.030.000	75 Buku	2.000.000	100	0,98	75 Buku	**225**	**56,25**
			Jumlah Barang Penggandaan	8200 Lmbr	6.090.450	2050 Lmbr		2050 Lmbar	2.030.000	2050 Lembar		100	0	2050 Lmbar	**6150**	**1537,5**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2920 Exe	7.118.172	-		730 Exemplar	1.792.592	-		0	0	730 Exemplar	**730**	**182,5**
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	140 Kali	40.452.250	28 Kali	5.000.000	35 Kali	10.150.000	28 Kali	5.000.000	0,8	0,49	35 Kali	**91**	**22,75**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	316379.025	15 Kali	5.000.000	30 Kali	80.305.075	15 Kali	5.000.000	0,5	0,06	30 Kali	**60**	**15**
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dok	1.522.613	-		1 Dok	507.500	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Sistem Inf	1.522.613	-		1 sistem Informasi	507.500	-		0	0	1 Sistem Informasi	**1**	**0,25**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**52.313.535**	**100 %**	**3.595.500**	**100 %**	**13.670.504**	**100 %**	**3.595.500**	**100**	0,26	**100%**	**300**	**75**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	800 Surat	5.318.174	200 Lmbr		200 Lmbar	1.339.293	200 Lembar		100	0	200 Surat	**600**	**150**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Bln	40.904.910	12 Bln	3.595.500	12 Bulan	10.301.212	12 Bulan	3.595.500	100	0,34	12 Bln	**36**	**9**
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Bln	3.045.225	12 Bln		12 Bulan	1.015.000	12 Bulan		100	0	12 Bln	**36**	**9**

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Bln	3.045.225	12 Bln		12 Bulan	1.015.000	12 Bulan		100	0	12 Bln	**36**	**9**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**608.877.579**	**100 %**	**256.343.000**	**100 %**	**171.992.244**	**100%**	**256.343.000**	**100**	1,49	**100%**	**300**	**75**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48 Unit	12.998.329	3 Unit		3 Unit	40.042.244	3 Unit		100	0	12 Unit	**18**	**4,5**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	274.070.250	6 Unit	256.343.000	6 Unit	91.350.000	6 Unit	256.343.000	100	2,80	5 Unit	**17**	**4,25**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4 Unit	60.904.500	1 Unit		1 Unit	20.300.000	1 Unit		100	0	1 Unit	**3**	**0,75**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	15.226.125	2 Unit		2 Unit	5.075.000	2 Unit		100	0	12 Unit	**14**	**3,5**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	15.226.125	1 Unit		1 Unit	5.075.000	1 Unit		100	0	1 Unit	**3**	**0,75**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	15.226.125	-		1 Unit	5.075.000	-		0	0	1 Unit	**1**	**0,25**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	15.226.125	-		1 Unit	5.075.000	-		0	0	1 Unit	**1**	**0,25**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**87.813.758**	**0**		**100%**	**21.617.905**	**0**		**0**	0	**100%**	**100**	**25**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	50 Unit	24.940.925	-		13 Unit	3.045.000	-		0	0	14 Unit	**14**	**3,5**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6.090.450	-		2 Unit	2.030.000	-		0	0	2 Unit	**2**	**0,5**
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3 Unit	6.090.450	-		1 Unit	2.030.000	-		0	0	1 Unit	**1**	**0,25**
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Gedung	35.465.808	-		1 Gedung	9.437.905	-		0	0	1 Gedung	**1**	**0,25**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	6.090.450	-		1 Unit	2.030.000	-		0	0	1 Unit	**1**	**0,25**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	9.135.675	-		1 Unit	3.045.000	-		0	0	1 Unit	**1**	**0,25**
2		**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.269.896.835**	**100%**	**895.877.500**	**100%**	**300.000.000**	**100%**	**895.877.500**	**100**	2,98	**100%**	**300**	**75**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah RPPLH Kabupaten/Kota**	**4 Dok**	**709.896.835**	**0**		**1 Dok**	**20.000.000**	**0**		**0**	0	**1 Dok**	**1**	**0,25**
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang Ditetapkan	1 Dok	649.896.835	-		0	-	-		0	0	0	**0**	**0**
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang diterbitkan	3 Buah	60.000.000	-		1 Buah	20.000.000	-		0	0	1 Buah	**1**	**0,25**

		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**3 Dok**	**560.000.000**	**100%**	**895.877.500**	**100%**	**280.000.000**	**100%**	**895.877.500**	**100**	3,19	**100%**	**300**	**75**
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Yang Terintegrasi Rencana Tata Ruang	1 Dok	280.000.000	1 Dok	396.309.500	1 Dok	280.000.000	1 Dok	396.309.500	100	1,41	,-	**2**	**0,5**
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Yang Terintegrasi RPJPD/RPJMD	1 Dok	140.000.000	1 Dok	499.568.000	1 Dok	-	1 Dok	499.568.000	100	0	1 Dok	**3**	**0,75**
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	1 Dok	140.000.000	-		-	-	-		0	0	1 Dok	**1**	**0,25**
3		**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungah Hidup**	**100%**	**1.428.086.210**	**100%**	**4.960.000**	**100%**	**350.000.000**	**100%**	**4.960.000**	**100**	0,01	**100%**	**300**	**75**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berhasil dicegah**	**100%**	**500.089.830**	**100%**	**4.960.000**	**100%**	**127.000.000**	**100%**	**4.960.000**	**100**	0,03	**100%**	**300**	**75**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dok	476.089.830	1 Dok	4.960.000	1 Dokumen	119.000.000	1 Dok	4.960.000	100	0.04	1 Dok	**3**	**0,75**
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik sungai yang dipantau	27 Titik	24.000.000	3 Titik Sungai		9 Titik Sungai	8.000.000	3 Titik Sungai		0,33	0	9 Titik	**15**	**3,75**
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berhasil ditangani**	**95.00 %**	**897.996.380**	**0%**		**80.00%**	**213.000.000**	**0%**		0	0	**95.00%**	**95**	**23,75**
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang disampaikan kepada Masyarakat	3 Kali	30.000.000	-		1 Kali	10,000,000	-		0	0	1 Kali	**1**	**0,25**
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Mata Air yang Terpelihara	540 Mata air	867.996.380	0 Titik Mata Air		135 Mata Air	203.000.000	0 Titik Mata Air		0	0	135 Mata Air	**135**	**33,75**
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berhasil ditangani**	**100%**	**30.000.000**	**0%**		**100%**	**10.000.000**	**0%**		**0**	0	**100%**	**100**	**25**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	6 Kali	6.000.000	-		2 Kali	2.000.000	-		0	0	2 Kali	**2**	**0,5**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	6 Kali	6.000.000	-		2 Kali	2.000.000	-		0	0	2 Kali	**2**	**0,5**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	6 Kali	6.000.000	-		2 Kali	2.000.000	-		0	0	2 Kali	**2**	**0,5**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	6 Kali	6.000.000	-		2 Kali	2.000.000	-		0	0	2 Kali	**2**	**0,5**

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	6 Kali	6.000.000	-		2 Kali	2.000.000	-		0	0	2 Kali	**2**	**0,5**
4		**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Persentase Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang Dikelola**	**100%**	**2.916.998.040**	**70%**	**4.915.000**	**100%**	**700.000.000**	**70%**	**4.915.000**	70	0,007	**100%**	**240**	**60**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang di Kelola**	**100%**	**2.916.998.040**	**70%**	**4.915.000**	**100%**	**700.000.000**	**70%**	**4.915.000**	70	0,007	**100%**	**240**	**60**
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1 Dok	40.000.000	-		-	10.000.000	-		0	0	-	**0**	**0**
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	12 Ha	80.000.000	-		4 Ha	30.000.000	-		0	0	4 Ha	**4**	**1**
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Areal RTH yang dikelola	120 Ha	2.492.558.040	30 Ha	4.915.000	30 Ha	580.000.000	30 Ha	4.915.000	100	0,008	30 Ha	**90**	**22,50**
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	16 Ha	124.440.000	-		4 Ha	20.000.000	-		0	0	4 Ha	**4**	**1**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Lembaga dan SDM Pengelola Keaneka ragaman hayati yang ditingkatkan kapastitasnya	3 Kel	30.000.000	-		1 kelompok	10.000.000	-		0	0	1 Kel	**1**	**0,25**
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	150.000.000	-		1 Unit	50.000.000	-		0	0	1 Unit	**1**	**0,25**
5		**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)**	**100%**	**150.000.000**	**0%**	**3.810.000**	**100 %**	**50.000.000**	**0%**	**3.810.000**	**0**	**0.076**	**100 %**	**100**	**25**
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase kegiatan penyimpanan sementara limbah B3**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**1.815.000**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**1.815.000**	**100**	**0,072**	**100 %**	**300**	**75**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	33 Dok	37.500.000	2 Dok	1.815.000	10 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	1.815.000	0,2	0,145	13 Dok	**17**	**4,25**
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan	99 Usaha	37.500,.	2 Usaha		33 Usaha	12.500.000	2 Usaha		0,06	0	33 Usaha	**37**	**9,25**
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**1.995.000**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**1.995.000**	**100**	0,079	**100%**	**300**	**75**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3	15 Dok	37.500.000	2 Dok	1.995.000	5 Dokumen	12.500.000	2 Dok	1.995.000	**0,4**	0,16	5 Dok	**9**	**2,25**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Kegiatan Koordinasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	6 Kali	37.500.000	-		2 Kali	12.500.000	-		0	0	2 Kali	**2**	**0,5**
6		**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH**	**100%**	**227.861.830**	**100%**	**9.970.000**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**9.970.000**	**100**	**0,19**	**100%**	**300**	**75**

		Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur**													
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**400 Usaha**	**227.861.830**	34 Usaha	**9.970.000**	100 Usaha	**50.000.000**	34 Usaha	**9.970.000**	0,34	**0,19**	**100 Usaha**	**168**	**42**
			Persentase Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**100%**										**100%**		
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	300 Usaha	6.000.000	11 Usaha	4.975.000	100 Usaha	2.000.000	11 Usaha	4.975.000	0,11	2,48	100 Usaha	**122**	**30,5**
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	2 Orang	30.000.000	-		1 Orang	10,000,000	-		0	0	1 Orang	**1**	**0,25**
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan H3idup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	400 Usaha	161.861.830	34 Usaha	4.995.000	100 Usaha	28.000.000	34 Usaha	4.995.000	0,34	0,17	100 Usaha	**168**	**42**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	3 Lap	30.000.000	-		1 Laporan	10.000.000	-		0	0	1 Laporan	**1**	**0,25**
7		**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**	**Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH yang Diakui Keberadaannya**	**41%**	**150.000.000**	**0%**	**2.970.000**	**28 %**	**50.000.000**	**0%**	**2.970.000**	**0**	0,05	**41%**	**41**	**10,25**
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui**	**66 Kel**	**75.000.000**	**0 Kel**	**2.970.000**	**22 Kelompok**	**25.000.000**	**0 Kel**	**2.970.000**	**0**	0,11	**22 Kel**	**22**	**5,5**
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui	9 Kali	75.000.000	2 Kali	2.970.000	3 Kali	25.000.000	2 Kali	2.970.000	0,66	0,12	3 Kali	**7**	**1,75**
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya**	44 Kel.	75.000.000	**0**		**22 Kelompok**	**25,000,000**	**0 Kel**		**0**	0	**22 Kel**	**22**	**5,5**
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diberdayakan, didampingi, dan diperkuat	44 Kel	75.000.000	0 Kel		22 Kelompok	25,000,000	0 Kel		0	0	22 Kel	**22**	**5,5**

8		**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan di bidang lingkungah hidup yang ditingkatkanyan kapasitas dan kompentesinya**	**100%**	**150.000.000**	**0%**	**5.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**0%**	**5.000.000**	**0**	0,1	**100.00%**	**100**	**25**
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kelompok 3R yang mendapat pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**	66 Kel	**150.000.000**	**0 Kel**	**5.000.000**	**22 Kel**	**50.000.000**	**0 Kel**	**5.000.000**	**0**	0,1	**22 Kel**	**22**	**5,5**
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan / atau kelompok yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya bidang lingkungan hidup	66 Kel	51.000.000	-		22 Kel	17.000.000	-		0	0	22 Kel	**22**	**5,5**
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga dan / atau Kelompok masyarakat yang mendapat pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	66 Kelompok	51.000.000	0 Kel		22 Kelompok	17,000,000	0 Kelompok		0	0	22 Kelompok	**22**	**5,5**
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga dan / atau Kelompok masyarakat yang mendapat Penyuluhan dan Kampanye lingkungan hidup	66 Kel	48.000.000	10 Kel	5.000.000	22 Kelompok	16.000.000	10 Kelompok	5.000.000	0,45	0,31	22 Kelompok	**42**	**10,5**
9		**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**96.66 %**	**120.000.000**	**0%**		**33,30%**	**40.000.000**	**0%**		**0**	**0**	**33.30%**	**33,30**	**8,3**
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	300 Usaha	120.000.000	**0 Usaha**		**100 Usaha**	**40,000,000**	**0 Usaha**		0	0	**100 Usaha**	**100**	**25**
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba	3 Kali	120.000.000	0 Kali		1 Kali	40,000,000	0 Kali		0	0	1 Kali	**1**	**0,25**
10		**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Sengketa Lingkungan Hidup**	**100%**	**150.000.000**	**30%**	**1.835.000**	**100%**	**50.000.000**	**30%**	**1.835.000**	**0,30**	0,03	**100%**	**160**	**40**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang diselesaikan**	**100%**	**150.000.000**	**30%**	**1.835.000**	**100%**	**50.000.000**	**30%**	**1.835.000**	**0,30**	0,03	**100%**	**160**	**40**
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dan dikelola	30 dok	75.000.000	3 Dok	1.835.000	10 Dok	25.000.000	3 Dok	1.835.000	0,3	0,07	10 dok	**16**	**4**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	30 Kali	75.000.000	3 Kali		10 Kali	25.000.000	3 Kali		0,3	0	10 Kali	**16**	**4**
11		**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manggarai Timur**	**9.92%**	**2.330.672.850**	**5,70%**	**778.575.780**	**8,96%**	**550.000.000**	**5,70%**	**778.575.780**	**0,63**	1,41	**9.92%**	**21,32**	**5,33**
		Pengelolaan Sampah	**Jumlah sampah yang di kelola**	**3000 Ton**	**2.321.672.850**	**2160 Ton**	**778.575.780**	**3000 Ton**	**547.000.000**	**2160 Ton**	**778.575.780**	**0,72**	1,42	3000 Ton	**7320**	**1830**
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R	12395, 4 Ton	15.000.000	-		4.131,8 Ton	5,000,000	-		0	0	4.131,8 Ton	4.131,8	**1032,95**

HIJAU BUMIKU

		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah Yang diolah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		1.936.686.500	2160 Ton	502.137.480	3000 Ton	484.735.500	2160 Ton	502.137.480	0,72	1,03	3000 Ton	**7320**	**1830**
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok 3 R yang terbentuk	30 Kel	45.000.000	-		10 Kel	15.000.000	-		0		10 Kelompok	**10**	**2,5**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	8 Kali	147.283.500	2 kali		10 kali	37.264.500	2 kali		20		2 Kali	**6**	**1,5**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4084 Karung Sampah	177.702.850	1021 Karung Sampah	276.438.300	1021 Karung Sampah	5.000.000	1021 Karung Sampah	276.438.300	100		1021 Karung Sampah	**3063**	**765,75**
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**3 Kali**	**9.000.000**	**4 Kali**		**1 Kali**	**3.000.000**	**4 Kali**		**400**		**1 Kali**	**9**	**2,25**
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah pengeloaan sampah oleh swasta yang taat Ijin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	15 kali	6.000.000	4 Kali		5 Kali	2.000.000	4 Kali		80		5 kali	**13**	**3,25**
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan	12 Kali	3.000.000	4 Kali		4 Kali	1.000.000	4 Kali		100		4 Kali	**12**	**4**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024.

Adapun hasil analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada table Tabel T.C.30

Tabel T.C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DLH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks Lingkungan Hidup	IKLH 66.5- 68.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	60,52%	69,04	82,91%	86,16%	79,92%	100%	89,41	89,41	
2	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang Dikelola			100%	100%	80%	90%	70%	100%	80%	90%	RTH yang dikelola tahun 2025 seluas 30 Ha.
4	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Tahun 2024 indikator Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup tidak terjawab karena tidak ada intervensi anggaran untuk menjawab indicator tersebut.
5	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.	100%	100%	60%	70%	73%	0%	60%	70%	Tahun 2024 capaian 0% dikarenakan tidak ada intervensi anggaran untuk menjawab indicator Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur
6	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)			100%	100%	3%	5%	100%	77,28%	3%	5%	

BIRU LANGITKU, HIJAU BUMIKU

7	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH yang Diakui Keberadaannya			28%	41%	14%	14,50%	0%	0%	14,50%	14,50%	Tahun 2023 dan 2024 capaian 0% dikarenakan tidak ada intervensi anggaran untuk menjawab indicator Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH yang Diakui Keberadaannya.
8	Persentase lembaga kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup yang ditingkatkanyan kapasitas dan kompentesinya			100%	100%	70%	75%	0%	0%	70%	75%	Tahun 2023 dan 2024 capaian 0% dikarenakan tidak ada intervensi anggaran untuk menjawab indicator Persentase lembaga kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup yang ditingkatkanyan kapasitas dan kompentesinya
9	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			33,30	33,30	12%	15%	0%	0%	12%	15%	Tahun 2023 dan 2024 capaian 0% dikarenakan tidak ada intervensi anggaran untuk menjawab indicator Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10	Persentase Sengketa Lingkungan Hidup			100%1	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Tahun 2024 capaian 0% dikarenakan tidak ada intervensi anggaran untuk menjawab indicator Persentase Sengketa Lingkungan Hidup
11	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manggarai Timur	Indonesia Bersih Sampah 2025	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	8,96%	9,92%	10%	12%	**5,70%**	**61,3%**	60%	60%	Pelayanan persampahan masih difokuskan dalam wilayah kota Borong di 3 kelurahan 2 desa Pengelolaan sampah dengan sistim kontrol land feld

BIRU LANGITKU,
HIJAU BUMIKU

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP MANGGARAI TIMUR

Berdasarkan Perda Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor. 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, menetapkan bahwa Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Sedangkan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur adalah:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 tertuang isu-isu strategis yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024 adalah: "***Pembangunan Infrastuktur Dasar yang Merata dan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan"***

Kabupaten Manggarai Timur dalam Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis OPD periode 2019-2024 yang telah disusun, dan diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Timur.

Review terhadap RKPD / Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Kabupaten Manggarai Timur tertuang dalam Tabel T.C.31.

BIRU LANGITKU,
HIJAU BUMIKU

Tabel T.C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Manggarai Timur

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA OPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2025		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2026	
				TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	8	9	3	4	15	16
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			**4.017.776.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**			**3.957.966.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.070.990.988,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.011.180.988,00**
	-	**-**			**2.070.990.988,00**	**-**			**2.011.180.988,00**
1,	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**	**200.000.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**	**0,00**
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	150.000.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	0 Dokumen	0,00
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	150.000.000,00		*Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan*	0 Dokumen	0,00
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	0,00

	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00		*Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun*	1 Dokumen	0,00	
2,	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**	**185.000.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**	**200.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	55.000.000,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	100 Persen	50.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	5.000.000,00		*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	1 Dokumen	0,00	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	10.000.000,00		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	20.000.000,00		*Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim*	1 Laporan	20.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				

			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	20.000.000,00		*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	1 Dokumen	20.000.000,00	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	120.000.000,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	80 Persen	140.000.000,00	
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	21 Titik	120.000.000,00		*Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan*	31 Titik	140.000.000,00	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	100 Persen	10.000.000,00	
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	5.000.000,00		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan*	2 Dokumen	5.000.000,00	
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2 Kegiatan	5.000.000,00		*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota*	2 Kegiatan	5.000.000,00	
3,	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**	**-**	**220.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**	**-**	**277.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	220.000.000,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	100 Persen	277.000.000,00	

	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000,00		*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun*	1 Dokumen	200.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha	20.000.000,00		*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	30 Ha	22.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	20.000.000,00		*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*	1 Unit	25.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	30.000.000,00		*Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Unit	30.000.000,00	
4,	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**	**-**	**151.500.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**	**-**	**158.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	100.000.000,00	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	100 Persen	100.000.000,00	
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	50.000.000,00		*Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	10 Dokumen	50.000.000,00	

	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3				
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	50.000.000,00		*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3*	10 Laporan	50.000.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	51.500.000,00	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	58.000.000,00	
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	10.000.000,00		*Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	10 Dokumen	16.500.000,00	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				

HIJAU BUMIKU

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2 Dokumen	41.500.000,00		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya*	2 Dokumen	41.500.000,00	
5,	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**	**-**	**145.000.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**	**-**	**180.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	145.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Usaha	180.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	25 Dokumen	35.000.000,00		*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*	100 Dokumen	35.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	75.000.000,00		*Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya*	3 Orang	95.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				

			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 Badan Usaha	35.000.000,00		*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	100 Badan Usaha	50.000.000,00	
6,	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**	**-**	**50.500.000,00**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**	**-**	**50.500.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-	25.000.000,00	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	22 Kelompo k	25.000.000,00	
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3 Dokumen	25.000.000,00		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH*	3 Dokumen	25.000.000,00	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-	25.500.000,00	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	22 Kelompo k	25.500.000,00	
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				

			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	25.500.000,00		*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*	1 Dokumen	25.500.000,00	
7,	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**-**	**33.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**-**	**33.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	33.000.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	22 Kelompo k	33.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	17.000.000,00		*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	1 Dokumen	17.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	22 Orang	16.000.000,00		*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*		16.000.000,00	
8,	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**-**	**25.000.000,00**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**-**	**25.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Pengharga an	25.000.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				

			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	25.000.000,00		*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*	4 Entitas	25.000.000,00	
9,	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**	**30.000.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**	**50.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	100 Persen	50.000.000,00	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	25.000.000,00		*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani*	20 Pengaduan	25.000.000,00	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	5.000.000,00		*Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota*	20 Perkara	25.000.000,00	
10,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**	**882.735.500,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**	**882.735.500,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-	872.735.500,00	Pengelolaan Sampah	-	3000 Ton	872.735.500,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				

			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	22 Kelompok	25.000.000,00		*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*	10 Kelompok	25.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	25.000.000,00		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada*	2 Dokumen	25.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	318.022.460,00		*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	5 Unit	318.022.460,00	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan				Penanganan sampah melalui pengangkutan				
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3000 Ton	504.713.040,00		*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*	3000 Ton	504.713.040,00	
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-	10.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	1 kali	10.000.000,00	
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	4 Laporan	10.000.000,00		*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota*	4 Laporan	10.000.000,00	
11,	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	**148.255.488,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	**154.945.488,00**	
	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	8.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	250000000 Rupiah	10.000.000,00	
	-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	8.000.000,00		*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*	1 Dokumen	10.000.000,00	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.261.695,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen	13.261.695,00	
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.075.000,00		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	5.075.000,00	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.015.000,00		*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.015.000,00	
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.015.000,00		*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1.015.000,00	

	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.015.000,00		*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1.015.000,00	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	507.500,00		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	507.500,00	
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.634.195,00		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	4.634.195,00	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	56.683.793,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	56.683.793,00	
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	10.000.000,00		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	35 Laporan	10.000.000,00	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	25.000.000,00		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	30 Laporan	25.000.000,00	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.310.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	15.000.000,00	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.310.000,00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	15.000.000,00	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	60.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	60.000.000,00	
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000,00		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	6 Dokumen	60.000.000,00	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	56.683.793,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	56.683.793,00	
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	19.653.793,00		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	18 Paket	19.653.793,00	
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	2.030.000,00		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2.030.000,00	
	X	**NON URUSAN**			**1.946.785.012,00**	**NON URUSAN**			**1.946.785.012,00**	
	-	**-**			**1.946.785.012,00**	**-**			**1.946.785.012,00**	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.895.770.012,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	1.895.770.012,00	
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.895.770.012,00		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	23 Orang/bulan	1.895.770.012,00	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	50.000.000,00	

	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	50.000.000,00		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	12 Unit	50.000.000,00	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.015.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen	1.015.000,00	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.015.000,00		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.015.000,00	
	J U M L A H				**4.017.776.000,00**				**3.957.966.000,00**	

BIRU LANGITKU,
HIJAU BUMIKU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maka diperlukan telaah terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

Visi Kabupaten Manggarai Timur “Mewujudkan Masyarakat Manggarai Timur Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya (MATIM SEBER)”. Adapun penjelasan dari visi tersebut yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan. Dari penjelasan tersebut terdapat hubungan antara visi Kabupaten Manggarai Timur dengan sasaran RPJMN yaitu meningkatkan *role model* sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan yang dapat diindikasikan melalui kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan untuk sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup tercermin pada misi Kabupaten Manggarai Timur yaitu pada Misi Ketiga: “Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berbasis Lingkungan Hidup untuk Memudahkan Akses ke Pelayanan Dasar Dan Mendukung Prioritas Ekonomi Unggulan”. Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur yang berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Timur diarahkan pada upaya menetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya air.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah:

(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6 pada tahun 2019. Unsur utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

(2) Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBP.

Sejalan dengan isu strategis Propinsi NTT, Kabupaten Manggarai Timur dalam Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur secara ringkas disajikan pada **Tabel** III.1 berikut:

Tabel III.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur
➢ MenjagaKualitas Lingkungan Hidup melalui Pengelolaan Lingkungan yang efektif dan efisien ➢ Memanfaatkan SDA secara lestari ➢ Melestarikan keanekaragaman hayati melaui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konservasi lingkungan	➢ Meningkatnya Luas Rehabilitasi hutan seluas 500 Ha. ➢ Meningktnya Luas Rehabilitasi lahan kritis seluas 500 Ha. ➢ Meningkatnya luas hutan tanaman endemik lokal seluas 5.000 Ha.	➢ Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup. ➢ Mewujudkan Lingkungan Hidup Lestari

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkngan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan DLH Kabupaten Manggarai Timur:
   Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Tangguh Bencana
b. Sasaran DLH Kabupaten Manggarai Timur:
   Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	54,90%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2024 yang meliputi Evaluasi Renja DLH Kabupaten Manggarai Timur. Berikut ini program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Manggarai Timur, sesuai tabel. III.3:

Tabel. III.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan:	
1	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan:	
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
Kegiatan:	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan:	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan:	
3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan:	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan:	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan:	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan:	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan:	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan:	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan:	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
Kegiatan:	
1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Kegiatan:	
2	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:	
1	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
3	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
Kegiatan:	
1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Kegiatan:	
2	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan:	
3	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
4	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**
Kegiatan:	
1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
4	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
5	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)**
Kegiatan:	
1	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**
Sub Kegiatan:	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
Kegiatan:	
2	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
6	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Kegiatan:	
1	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**
Kegiatan:	
1	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**
Sub Kegiatan:	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Kegiatan:	
2	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**
Sub Kegiatan:	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH
8	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
Kegiatan:	
1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
9	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
Kegiatan:	
1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
Kegiatan:	
1	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan:	
1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
11	**Program Pengelolaan Persampahan**
Kegiatan:	
1	**Pengelolaan Sampah**

Sub Kegiatan:	
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
4	Penanganan sampah melalui pengangkutan
Kegiatan:	
2	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**
Sub Kegiatan:	
1	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk sumber dana APBD Kabupaten dapat dilihat pada Tabel T.C.33.

BIRU LANGITKU,
HIJAU BUMIKU

TABEL T.C.33

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**4.507.753.707**					**4.595.394.701**
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 Persen**			**148.255.488**					**154.945.488**
2	11	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kesesuain Dokumen perencann (RENSTRA,RENJA,PPAS,RKA,DPA) Perangkat Daerah				100 Persen	13.261.695					13.261.695
								Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja				91-100						
								Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra				91-100						
								Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah				100 Persen						

					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		Kecamatan Borong		1 Dokumen		8.000.000				1 Dokumen	10.000.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		· Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah · Terlaksananya Forum Perangkat Daerah · Tersedianya Dokumen Renja Perangkat Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		5.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	5.075.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		*Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1.015.000				1 Dokumen	1.015.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1.015.000				1 Dokumen	1.015.000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1.015.000				1 Dokumen	1.015.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		· Tersediannya Laporan LPPD · Tersediannya Laporan Lakip · Tersediannya Laporan LKPJ		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan		507.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	507.500

BIRU LANGITKU
HIJAU BUMIKU

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Renjarenstra Perangkat Daerah * Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Renstra		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		4.634.195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	4.634.195
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen		1.015.000				1 Dokumen	1.015.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.955.770.012					**60.000.000**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 0rang		1.895.770.012	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23 0rang	1.895.770.012
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Orang		60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Orang	60.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							56.683.793			56.683.793			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Paket		19.653.793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18 Paket	19.653.793
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		· Tersedianya Barang Cetakan · Tersedianya Barang Penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Paket		2.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Paket	2.030.000

					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Lap		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35 Laporan	10.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Lap		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Lap	25.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10.310.000					**15.000.000**
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Lap	10.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Lap	15000000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.000.000					50.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Unit	50.000.000
			02.11.02		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**200.000.000**					0
2.11.02.2.01					**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								150.000.000					0
2.11.02.2.01.0003					Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Dokumen RPPLH yang Ditetapkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2.11.02.2.02					**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**								50.000.000					0

HIJAU BUMIKU

2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup		*Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun*				1 Dokumen		50.000.000				0
02.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**185.000.000**				200.000.000
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								55.000.000			**0**	100%	50.000.000
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Laporan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	10.000.000				1 Dokumen	10.000.000
2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota		*Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	20.000.000				1 Laporan	20.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah titik sungai yang dipantau		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	20.000.000

BIRU LANGIT KU
HIJAU BUMIKU

2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								120.000.000				80%	140.000.000
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Mata Air yang Terpelihara		Kec. Pocoranaa, Kecamatan Kota Komba, Kec. Rana Mese			21 Titik Mata Air	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31 Titik	140.000.000
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								10.000.000				100%	10.000.000
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	5.000.000
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		5.000.000				2 Kegiatan	5.000.000
02.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**220.000.000**					**277.000.000,00**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								220.000.000					277.000.000,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						1 Dokumen		150.000.000				1 Dokumen	200.000.000,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas Areal RTH yang dikelola		Kec. Borong, Kec. Kota Komba		30 Ha		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Ha	22.000.000,00
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						1 Unit		20.000.000				1 Unit	25.000.000,00
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						4 Unit		30.000.000				1 Unit	

BIRU LANGITKU HIJAU BUMIKU

02.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**151.500.000**				**158.000.000,00**
2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**								100.000.000				100.000.000
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Dok		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Persen	50.000.000
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Usaha/Kegiatan		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Dokumen	50.000.000,00
2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								51.500.000				100 Persen	58.000.000
2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Dok		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Dokumen	16.500.000
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Kegiatan Koordinasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Usaha/Kegiatan		41.500.000				2 Dokumen	41.500.000
02.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**145.000.000**					180000000
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								145.000.000				100 Usaha	180000000

2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Usaha/Kegiatan		35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Dokumen	35000000
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		*Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya*						75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Orang	95.000.000,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100		35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Badan Usaha	50.000.000
02.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**								**50.500.000**			**0**		
2.11.07.2.01	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**								25.000.000			**0**		
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		

BIRU LANGITKU, HIJAU BUMIKU

2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**								**25500000**					
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diberdayakan, didampingi, dan diperkuat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 MHA		25.500.000				22 Kelompok	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**33.000.000**			**0**		
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								33.000.000			**0**	22 Kelompok	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Kelompok		17000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Kelompok		16.000.000			0		16000000
02.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**25000000**			**0**		**25.000.000,00**
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								25.000.000			**0**		**25.000.000,00**
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Kegiatan Lomba		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Entitas		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	4 Entitas	**25.000.000,00**
02.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**30.000.000**					**50.000.000,00**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**								30.000.000				100 Persen	50000000

2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dan dikelola		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Pengaduan		25000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Pengaduan	25000000
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		*Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Perkara		5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Perkara	25000000
02.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**882735500**				3000 Ton	872735500
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**								872.735.500					
2.11.11.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada*		Kec. Borong, Kec. Kota Komba		2 Dokumen		25000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	25000000
2.11.11.2.01.0005	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Kelompok		25000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15.750.000	10 Kelompok	25.000.000,00

BIRU LANGITKU
HIJAU BUMIKU

2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA		*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*		Kecamatan Kota Komba, Kec. Rana Mese		5 Unit		318022460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		179.379.892	5 Unit	318.022.460,00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan		*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*			3000 Ton			504.713.040				3000 Ton	504.713.040,00
2.11.11.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**								10.000.000					
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota*			4 Laporan			10.000.000				4 Laporan	10.000.000
TOTAL									**4.017.776.000**					**3.957.966.000**

BIRU LANGITKU, HIJAU BUMIKU

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2025 adalah sebanyak: 11 Program, 25 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar **Rp 4.017.776.000**,00. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 4.1**. di bawah.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP								**4.017.776.000,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**2.070.990.988,00**
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**4.507.753.707**
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 Persen**			**148.255.488**
2	11	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kesesuain Dokumen perencann (RENSTRA,RENJA,PPAS,RKA,DPA) Perangkat Daerah				100 Persen	13.261.695
								Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja				91-100	
								Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra				91-100	
								Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah				100 Persen	
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		Kecamatan Borong		1 Dokumen		8.000.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		· Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah · Terlaksananya Forum Perangkat Daerah · Tersedianya Dokumen Renja Perangkat Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		5.075.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		*Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1.015.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1.015.000

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1.015.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		· Tersediannya Laporan LPPD · Tersediannya Laporan Lakip · Tersediannya Laporan LKPJ		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan		507.500
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Renjarenstra Perangkat Daerah * Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Renstra		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		4.634.195
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen		1.015.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.955.770.012
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 0rang		1.895.770.012
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Orang		60.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							56.683.793	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Paket		19.653.793
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		· Tersedianya Barang Cetakan · Tersedianya Barang Penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Paket		2.030.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Lap		10.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Lap		25.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10.310.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Lap	10.310.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		50.000.000
			02.11.02		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**200.000.000**
2.11.02.2.01					**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								150.000.000
2.11.02.2.01.0003					Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Dokumen RPPLH yang Ditetapkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		150.000.000
2.11.02.2.02					**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**								50.000.000
2.11.02.2.02.0006					Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup		*Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun*				1 Dokumen		50.000.000
02.11.03					**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**185.000.000**
2.11.03.2.01					**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								55.000.000
2.11.03.2.01.0001					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Laporan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	5.000.000

2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	10.000.000
2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota		*Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	20.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah titik sungai yang dipantau		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	20.000.000
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								120.000.000
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Mata Air yang Terpelihara		Kec. Pocoranaa, Kecamatan Kota Komba, Kec. Rana Mese			21 Titik Mata Air	120.000.000
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								10.000.000
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		5.000.000
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		5.000.000
02.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**220.000.000**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								220.000.000
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						1 Dokumen		150.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas Areal RTH yang dikelola		Kec. Borong, Kec. Kota Komba		30 Ha		20.000.000
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						1 Unit		20.000.000
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						4 Unit		30.000.000
02.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**151.500.000**
2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**								100.000.000
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Dok		50.000.000
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Usaha/Kegiatan		50.000.000
2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								51.500.000
2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Dok		10.000.000
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Kegiatan Koordinasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Usaha/Kegiatan		41.500.000
02.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**145.000.000**
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								145.000.000
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Usaha/Kegiatan		35.000.000
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		*Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya*						75.000.000

BUKU LANGIT KU
HIJAU BUMIKU

2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100		35.000.000
02.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**								**50.500.000**
2.11.07.2.01	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**								25.000.000
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25.000.000
2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**								**25500000**
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diberdayakan, didampingi, dan diperkuat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 MHA		25.500.000
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**33.000.000**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								33.000.000
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Kelompok		17000000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Kelompok		16.000.000
02.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**25000000**
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								25.000.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Kegiatan Lomba		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Entitas		25.000.000
02.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**30.000.000**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**								30.000.000
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dan dikelola		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Pengaduan		25000000
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		*Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota*		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Perkara		5.000.000
02.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**882735500**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**								872.735.500
2.11.11.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada*		Kec. Borong, Kec. Kota Komba		2 Dokumen		25000000

2.11.11.2.01.0005	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Kelompok		25000000
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA		*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*			Kecamatan Kota Komba, Kec. Rana Mese		5 Unit		318022460
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan		*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*				3000 Ton			504.713.040
2.11.11.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**									10.000.000
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota*				4 Laporan			10.000.000
TOTAL										**4.017.776.000,00**

BIRU LANGITKU,
HIJAU BUMIKU

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Timur periode 2019-2024 yang berisi program dan kegiatan tahun 2025 berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen masyarakat yang dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjawab Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur periode 2019-2024 .

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijak untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur secara intensif.

Borong, 06 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai Timur,

Kasmir Dalis Ariyanto, S. Hut
Pembina Tk.I
Nip. 19740809 200604 1 007